

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Digitalisasi berkembang pesat dalam berbagai sektor termasuk dalam sistem pembayaran. Pada era digitalisasi ini, efisiensi dan kecepatan transaksi menjadi kebutuhan utama dalam mendorong aktivitas ekonomi. Indonesia turut mengalami percepatan dalam digitalisasi sistem pembayaran yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan instrumen non-tunai seperti BI-RTGS, SKNBI, Uang Elektronik, ATM/debit, dan kartu kredit.

Perubahan preferensi masyarakat dari pembayaran tunai ke non-tunai tidak hanya didorong oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial dan psikologis yang semakin berpengaruh dalam perilaku keuangan individu. Persepsi terhadap efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transaksi digital menjadi determinan penting dalam pengambilan keputusan konsumen. Studi oleh Liébana-Cabanillas et al. (2020) menunjukkan bahwa faktor seperti kepercayaan terhadap sistem digital, persepsi risiko, dan pengaruh sosial dari lingkungan sekitar (*peer influence*) memainkan peran besar dalam mendorong adopsi pembayaran non-tunai, terutama di kalangan generasi muda urban.

Selain itu, pandemi COVID-19 mendorong pengaruh psikologis tersebut karena adanya pembatasan kontak fisik yang dapat disalurkan melalui uang tunai. Bank Indonesia dalam Laporan Sistem Pembayaran 2023 mencatat bahwa total transaksi digital banking mencapai Rp58.478,54 triliun sepanjang tahun 2023, tumbuh sebesar 14,85% (yoy).

Transaksi uang elektronik pun meningkat hingga 43,45% (yoy) menjadi Rp672,08 triliun. Fenomena ini menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju instrumen non-tunai dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

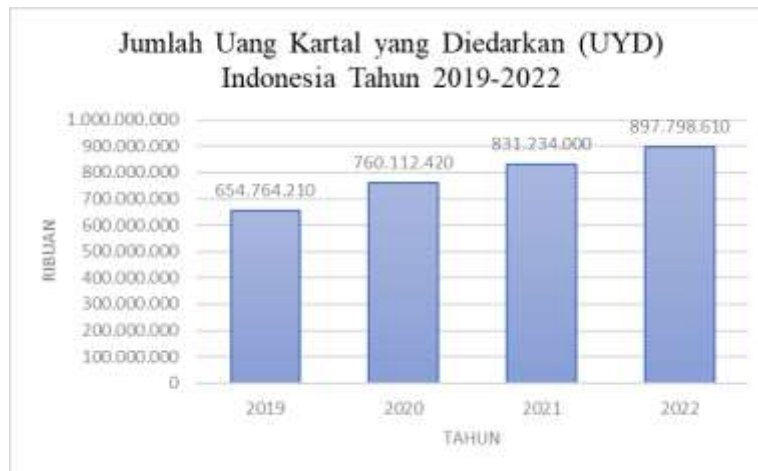
Meskipun berbagai negara telah mencatat adanya penurunan tajam dalam penggunaan uang tunai, Indonesia masih tergolong lambat dalam mewujudkan digitalisasi sistem pembayaran secara menyeluruh. Berdasarkan data World Bank (2022), hanya 51% orang dewasa di Indonesia yang melakukan pembayaran dengan saluran digital. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok (82%) atau Korea Selatan (89%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem pembayaran digital berkembang pesat, penggunaannya masih terbatas pada kelompok tertentu dan belum sepenuhnya menggantikan fungsi uang tunai dalam sistem ekonomi nasional.

Secara umum, sistem pembayaran dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai. Sistem pembayaran tunai mengandalkan uang kartal (uang kertas dan logam) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai alat transaksi utama dalam perekonomian. Namun, seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai beralih ke sistem pembayaran non-tunai yang menawarkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi. Sistem pembayaran non-tunai terdiri dari sistem ritel dan grosir. Sistem ritel mencakup APMK dan uang elektronik (*e-money*). Sistem ini memungkinkan transaksi cepat dan efisien tanpa uang tunai. Sementara itu, sistem grosir seperti SKNBI dan BI-RTGS digunakan untuk transaksi bernilai besar antar institusi keuangan (Bank Indonesia, 2023). Sejak diperkenalkan pada tahun 1990-an, APMK berkembang dengan kartu debit dan kredit, diikuti oleh uang elektronik yang semakin populer

untuk aktivitas transaksi harian. SKNBI dan BI-RTGS kemudian meningkatkan efisiensi transaksi antarbank.

Peningkatan ini berdampak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), di mana 84% UMKM di Indonesia melaporkan peningkatan transaksi setelah mengadopsi pembayaran digital (McKinsey & Company, 2021). Visa (2022) melalui survei yang dilakukan oleh YouGov juga mengungkapkan bahwa hampir 70% responden di Indonesia mengalami peningkatan penggunaan pembayaran digital selama pandemi. Hasil survey tersebut memperkuat penjelasan bahwa masyarakat Indonesia mulai beralih dari system pembayaran non tunai ke sistem pembayaran tunai. Peningkatan tren menunjukkan bahwa sistem pembayaran non-tunai secara bertahap menjadi substitusi uang tunai dalam berbagai transaksi harian. Hal ini selaras dengan penelitian Arango, Huynh, & Sabetti (2015) yang menunjukkan bahwa di negara-negara dengan infrastruktur pembayaran digital yang berkembang pesat, transaksi non-tunai semakin menggantikan penggunaan uang tunai.

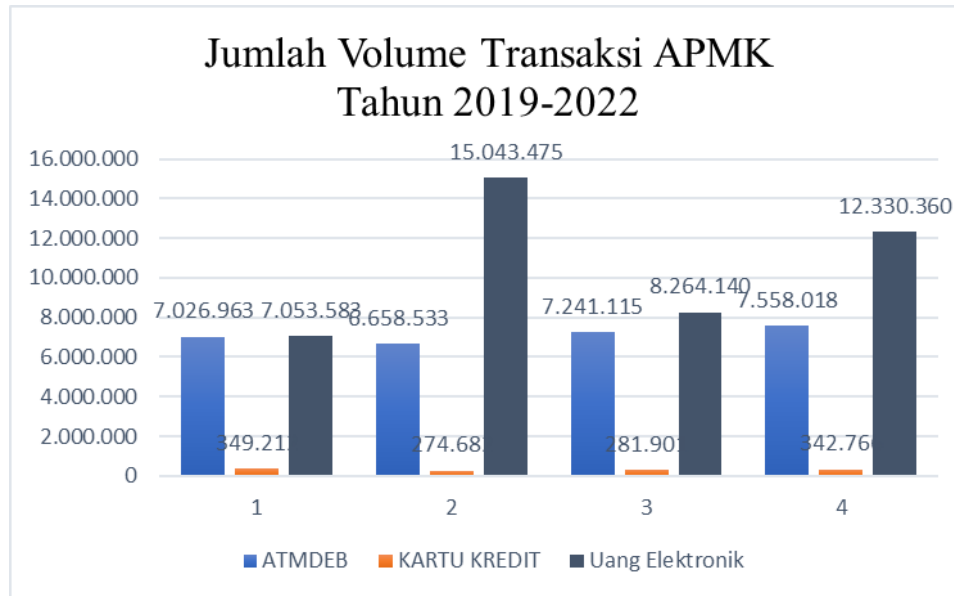
Dalam konteks ekonomi makro, perubahan sistem pembayaran ini berpotensi mempengaruhi jumlah uang kartal yang beredar. Menurut teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Fisher (1911), jumlah uang beredar, termasuk di dalamnya uang kartal dan giral, dipengaruhi oleh kecepatan perputaran uang serta volume transaksi. Seiring dengan meningkatnya adopsi pembayaran digital, terdapat kecenderungan bahwa permintaan terhadap uang kartal menurun, sebagaimana dibuktikan dalam penelitian terdahulu di berbagai negara (Arango, Huynh, & Sabetti, 2015; Rogoff, 2016). Namun, di Indonesia, dinamika ini masih menjadi perdebatan karena faktor inklusi keuangan, kebiasaan masyarakat, dan regulasi sistem pembayaran.



Gambar 1. 1 Jumlah Uang Kartal yang Diedarkan 2019-2022

Sumber: Statistik Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) Bank Indonesia (diolah)

Meskipun tren pembayaran non-tunai di Indonesia terus meningkat, jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) justru menunjukkan pola yang konsisten meningkat dalam periode 2019 hingga 2022. Seperti terlihat pada grafik, nilai UYD tumbuh dari Rp654,76 triliun pada 2019 menjadi Rp897,80 triliun pada 2022. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk stimulus moneter selama pandemi COVID-19, peningkatan belanja pemerintah, serta kecenderungan masyarakat menyimpan uang tunai sebagai bentuk lindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi (Bank Indonesia, 2023). Selain itu, preferensi terhadap uang tunai di kalangan masyarakat luar Jawa dan kelompok usia lanjut juga menjadi penyumbang tingginya sirkulasi uang kartal meskipun adopsi sistem pembayaran digital terus diperluas. Fenomena ini menjelaskan bahwa pergeseran sistem pembayaran di masyarakat Indonesia belum menyeluruh dan masih bertahap.



Gambar 1. 2 Jumlah Volume Transaksi APMK Tahun 2019-2022

Sumber: Statistik Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) Bank Indonesia (diolah)

Selain peningkatan jumlah uang kartal yang diedarkan, data transaksi alat pembayaran non-tunai juga menunjukkan dinamika menarik selama periode 2019 hingga 2022. Volume transaksi menggunakan ATM dan debit (ATMDEB) relatif stabil, berada di kisaran 7 miliar transaksi per tahun, dengan kecenderungan meningkat dari 7,03 miliar pada 2019 menjadi 7,56 miliar pada 2022. Hal ini mencerminkan bahwa ATM/debit masih menjadi instrumen utama dalam transaksi ritel masyarakat Indonesia. Untuk kartu kredit, tren yang ditunjukkan sistem pembayaran ini sedikit berbeda. Volume transaksi kartu kredit mengalami penurunan dari 349 juta transaksi pada 2019 menjadi 274 juta pada 2020. Penurunan ini disebabkan adanya tekanan ekonomi selama pandemi. Namun, transaksi kartu kredit mulai pulih di tahun-tahun berikutnya dan mencapai 342 juta pada 2022. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan kartu kredit masih memiliki porsi kecil masyarakat. Preferensi masyarakat lebih besar ke APMK berbasis saldo seperti kartu debit.

Tren sistem pembayaran APMK yang paling mencolok adalah lonjakan penggunaan uang elektronik pada tahun 2020. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dari 7,05 miliar transaksi (2019) menjadi 15,04 miliar transaksi. Lompatan ini sangat dipengaruhi oleh percepatan adopsi dompet digital dan pembayaran berbasis QRIS selama masa pandemi COVID-19. Meski mengalami sedikit penurunan pada 2021, volume transaksi uang elektronik kembali meningkat pada 2022 hingga mencapai 12,33 miliar transaksi. Data ini menegaskan bahwa uang elektronik telah menjadi preferensi utama dalam transaksi harian, terutama untuk pembelian kecil dan kebutuhan transportasi, serta menjadi pendorong utama perubahan perilaku masyarakat menuju sistem pembayaran yang lebih modern dan efisien.



Gambar 1. 3 Jumlah Volume Transaksi SKNBI dan RTGS Tahun 2019-2022

*Sumber: Statistik Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) Bank
Indonesia (diolah)*

Berdasarkan grafik, volume transaksi SKNBI mengalami tren kenaikan dari 155 juta transaksi pada 2019 menjadi 182 juta transaksi pada 2022. Kenaikan ini menunjukkan semakin meningkatnya peran SKNBI sebagai sistem kliring nasional untuk transaksi bernilai menengah, seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, dan penggajian. Peningkatan ini sejalan dengan digitalisasi layanan keuangan oleh sektor perbankan dan kebutuhan efisiensi sistem pembayaran antar lembaga yang terus berkembang. Sementara itu, transaksi BI-RTGS relatif stabil selama periode yang sama. Volume transaksi berada di kisaran 9,6 juta hingga 11,2 juta transaksi per tahun. Meskipun volumenya lebih rendah dibandingkan SKNBI, nilai transaksi pada sistem RTGS sangat besar karena digunakan untuk transaksi bernilai tinggi antar bank dan lembaga keuangan. Stabilitas volume transaksi RTGS mencerminkan fungsinya sebagai infrastruktur utama dalam menjaga likuiditas sistem keuangan nasional dan mendukung efisiensi pasar keuangan.

Tren ini mendukung argumen yang menjelaskan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi pada pembayaran ritel, tetapi juga merambah ke sistem pembayaran grosir walaupun belum sebesar sektor ritel. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti mengkaji pengaruh sistem pembayaran non-tunai terhadap Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) dengan mempertimbangkan kontribusi kedua sistem ini, baik dari sisi ritel (seperti APMK dan uang elektronik) maupun grosir (seperti SKNBI dan RTGS) karena keduanya mencerminkan perubahan dari masing-masing sektor alam sistem pembayaran nasional. Tren ini sejalan dengan temuan Bank Indonesia (2023) yang mencatat bahwa meskipun uang kartal tetap

digunakan dalam beberapa sektor, pembayaran non-tunai seperti APMK, SKNBI, dan BI-RTGS terus meningkat dan mulai menggantikan peran uang tunai dalam berbagai transaksi ekonomi.

Studi di berbagai negara menunjukkan bahwa peningkatan transaksi non-tunai dapat menyebabkan penurunan permintaan uang tunai. Bergman, Guibourg, & Segendorf (2019) menemukan bahwa di Swedia, adopsi sistem pembayaran digital secara luas menyebabkan penurunan signifikan dalam jumlah uang kartal yang beredar. Zhu & Zhou (2021) juga mencatat bahwa di Tiongkok, perkembangan uang elektronik dan pembayaran digital mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai. Selain itu, penelitian Arango, Huynh, & Sabeti (2015) di Kanada menunjukkan bahwa faktor demografi dan tingkat adopsi teknologi turut mempengaruhi substitusi uang tunai oleh instrumen pembayaran digital. Di kawasan Asia Tenggara, penelitian oleh Fung et al. (2018) menunjukkan bahwa adopsi sistem pembayaran non-tunai yang lebih luas, termasuk e-wallet dan kartu debit, memiliki korelasi dengan menurunnya peredaran uang kartal, terutama di negara-negara dengan kebijakan pembayaran digital yang agresif. Sementara itu, studi Hasan, De Renzis, & Schmiedel (2013) di zona Euro juga menemukan bahwa efisiensi sistem pembayaran digital berkontribusi terhadap penurunan penggunaan uang tunai, meskipun dengan variasi antarnegara tergantung pada faktor budaya dan infrastruktur keuangan.

Dari paparan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi sistem pembayaran dan kebijakan moneter yang lebih efektif di era digitalisasi keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dengan meningkatnya penggunaan instrumen pembayaran non-tunai seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Real Time Gross Settlement (RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan uang elektronik (e-money). Digitalisasi dalam sistem pembayaran Indonesia dipercepat dengan adanya perkembangan teknologi keuangan serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung transaksi yang lebih efisien, aman, dan inklusif. Peningkatan ini juga didorong oleh tren global yang menunjukkan adanya pergeseran menuju masyarakat cashless, sebagaimana dipaparkan dalam laporan Bank for International Settlements (BIS, 2022).

Meskipun tren transaksi non-tunai menunjukkan peningkatan yang pesat, jumlah uang kartal yang beredar di Indonesia masih mengalami fluktuasi. Berdasarkan teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Fisher (1911) dan studi empiris oleh Arango, Huynh, & Sabetti (2015) serta Rogoff (2016), adopsi sistem pembayaran non-tunai yang semakin luas seharusnya dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap uang tunai. Namun, dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti tingkat inklusi keuangan, preferensi masyarakat, serta kebijakan moneter masih dapat memengaruhi hubungan antara digitalisasi pembayaran dan jumlah uang kartal yang diedarkan (Bank Indonesia, 2023; McKinsey & Company, 2021).

Penelitian terdahulu yang dilakukan di beberapa negara lain menunjukkan bahwa digitalisasi dalam sistem pembayaran memiliki hubungan yang negatif dengan jumlah uang

kartal. Bergman, Guibourg, & Segendorf (2019) di Swedia menemukan bahwa peningkatan transaksi digital mengurangi permintaan uang tunai secara signifikan. Sementara itu, Zhu & Zhou (2021) di Tiongkok menunjukkan bahwa kebijakan adopsi sistem pembayaran non-tunai secara nasional telah mengurangi jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat. Bech, Faruqi, & Shirakawa (2018) menjelaskan bahwa efektivitas sistem pembayaran non-tunai bergantung pada kesiapan infrastruktur dan perilaku masyarakat yang akan berperan menjadi *user* pada sistem tersebut.

Di Indonesia, penelitian yang secara spesifik membahas mengenai volume transaksi berbagai sistem pembayaran tersebut masih cukup terbatas sehingga diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pembayaran non-tunai memengaruhi jumlah uang kartal yang beredar dalam perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sistem pembayaran non-tunai terhadap jumlah uang kartal yang diedarkan di Indonesia selama periode 2015-2024 dengan mempertimbangkan berbagai instrumen pembayaran digital serta faktor-faktor makroekonomi yang mempengaruhinya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan yang termuat dalam latar belakang dan rumusan masalah, dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh volume transaksi sistem pembayaran non-tunai terhadap jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) di Indonesia selama periode 2015-2024?
2. Apakah temuan empiris mengenai pengaruh sistem pembayaran non-tunai terhadap uang kartal di Indonesia konsisten dengan literatur terdahulu?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh sistem pembayaran non-tunai terhadap jumlah uang kartal yang diedarkan (UYD) di Indonesia dalam periode 2015-2024. Tujuan ini dimaksudkan untuk memahami sejauh mana pergeseran ke transaksi digital memengaruhi permintaan uang tunai.
2. Membandingkan hasil penelitian ini dengan studi terdahulu mengenai dampak sistem pembayaran digital terhadap peredaran uang kartal, baik dalam konteks Indonesia maupun secara global. Tujuan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

1.5. Motivasi Penelitian

Penelitian mengenai dampak sistem pembayaran non-tunai terhadap peredaran uang tunai telah banyak dilakukan terutama di negara maju dengan tingkat digitalisasi keuangan yang tinggi. Namun, sebagian besar studi lebih berfokus pada indikator jumlah uang beredar secara umum (M1 atau M2). Mereka belum spesifik menganalisis variabel *Uang Kartal yang Diedarkan (Currency in Circulation)*. Di Indonesia, penelitian yang secara langsung mengkaji hubungan antara volume transaksi berbagai instrumen pembayaran non-tunai seperti APMK, Uang Elektronik, SKNBI, dan BI-RTGS terhadap Uang Kartal yang Diedarkan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Lebih lanjut, peredaran uang kartal di Indonesia relatif stabil sejak 2016, namun pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan tren yang menonjol. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa selama pandemi terjadi pergeseran preferensi masyarakat dalam menggunakan instrumen pembayaran, baik karena faktor kesehatan ataupun karena adanya ketidakpastian ekonomi (Goodhart & Ashworth, 2020; Alvarez & Argente, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu menangkap pengaruh asimetris dari sistem pembayaran non-tunai terhadap peredaran uang kartal pada dua periode berbeda, yaitu sebelum dan sesudah pandemi.

Untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara berbagai instrumen pembayaran non-tunai termasuk APMK, Uang Elektronik, SKNBI, dan BI-RTGS terhadap Uang Kartal yang Diedarkan, penelitian ini menggunakan pendekatan *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL). Model ARDL dipilih karena mampu menangkap dampak jangka panjang dan jangka pendek secara simultan, serta lebih fleksibel dalam mengatasi variabel dengan integrasi berbeda ($I(0)$ dan $I(1)$).

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola hubungan antara sistem pembayaran non-tunai dan Uang Kartal yang Diedarkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan metode ARDL. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi Bank Indonesia dan otoritas terkait dalam merancang kebijakan sistem pembayaran yang lebih optimal, khususnya dalam mengelola keseimbangan antara transaksi digital dan kebutuhan uang tunai di masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi perbankan dan industri

teknologi keuangan (*fintech*) dalam mengembangkan strategi pembayaran digital yang penggunaannya dapat lebih menyeluruh.

1.7. Kontribusi Penelitian

Studi mengenai dampak sistem pembayaran non-tunai terhadap jumlah uang beredar telah banyak dilakukan tetapi sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada agregat M1 atau M2, tanpa secara spesifik menganalisis Uang Kartal yang Diedarkan (*Currency in Circulation, CIC*). Akibatnya, pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap jumlah uang tunai yang benar-benar beredar di masyarakat belum dapat terlihat dengan spesifik.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dengan secara khusus mengeksplorasi hubungan antara instrumen pembayaran non-tunai (BI-RTGS, SKNBI, APMK, dan Uang Elektronik) terhadap Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) di Indonesia.

Kontribusi lain dari penelitian ini adalah dengan mengikutsertakan analisis dampak dari pandemi yaitu sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 melalui variabel *dummy* untuk melihat apakah terjadi perubahan pola hubungan antara sistem pembayaran non-tunai dan peredaran uang kartal.

1.8. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Uang Kartal yang Diedarkan (UYD). Variabel ini mencerminkan jumlah uang tunai yang beredar di masyarakat. UYD dipilih karena mencerminkan preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang fisik dalam transaksi ekonomi.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari berbagai instrumen sistem pembayaran non-tunai. BI-RTGS (*Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*) digunakan untuk mengukur volume transaksi bernilai besar yang diselesaikan secara *real-time* antarbank. Uang Elektronik (UE) dipilih sebagai salah satu variabel karena merepresentasikan transaksi digital berbasis kartu atau server yang semakin berkembang. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang terdiri dari ATM+Debit dan Kartu Kredit. Penggunaan kartu ATM dan debit dapat berdampak dua arah terhadap UYD. Di satu sisi, meningkatnya transaksi kartu debit dapat menandakan peralihan ke sistem pembayaran non-tunai, tetapi peningkatan jumlah penarikan tunai melalui ATM juga dapat menandakan adanya peningkatan UYD. Sementara itu, kartu kredit berfungsi sebagai substitusi uang tunai dalam pembayaran sehingga peningkatan volume transaksi kartu kredit dapat menekan permintaan terhadap uang kartal. Penelitian ini juga menggunakan variabel SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia) sebagai indikator untuk transaksi masyarakat melalui sistem kliring nasional. SKNBI mencerminkan volume transaksi dengan nilai yang lebih kecil dibandingkan BI-RTGS

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peredaran uang kartal. Pertama, *Industrial Production Index* (IPI) digunakan sebagai proksi untuk aktivitas ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam periode bulanan. Peningkatan IPI menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Peningkatan ini dapat mempengaruhi permintaan uang kartal baik secara positif karena meningkatnya transaksi, maupun secara negatif karena meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital. Peneliti juga menggunakan variabel suku bunga domestik (*Interest Rate*) sebagai variabel kontrol karena mencerminkan kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi

insentif masyarakat dalam menyimpan uang di bank atau menarik uang kartal untuk transaksinya. Semakin tinggi suku bunga, semakin rendah kemungkinan masyarakat memegang uang tunai karena lebih menguntungkan untuk menyimpan dana dalam bentuk simpanan berbunga. Selain itu, peneliti juga menggunakan suku bunga asing (*Foreign Interest Rate*) oleh Fed Effective Fund Rate yang digunakan untuk melihat dampaknya terhadap arus modal dan nilai tukar dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap tingkat permintaan uang kartal di Indonesia. Selanjutnya, harga saham (*Stock Price*) dimasukkan sebagai variabel kontrol karena mencerminkan kondisi pasar keuangan. Peningkatan harga saham dapat menunjukkan optimisme investor dan meningkatkan aktivitas ekonomi non-tunai, sehingga dapat mengurangi permintaan terhadap uang kartal. Peneliti juga menggunakan variabel Inflasi yang mencerminkan kondisi ekonomi secara riil. Peningkatan inflasi dapat berdampak dua arah; negatif dan positif terhadap jumlah uang kartal. Terakhir, peneliti menggunakan variabel dummy Covid-19 untuk memastikan hasil penelitian tetap valid.

1.9. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dalam lima bagian utama sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi gambaran umum penelitian, mencakup latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka, yang menguraikan teori-teori yang mendukung penelitian serta kajian literatur terdahulu yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan rancangan penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, serta teknik yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi pemaparan serta analisis hasil pengujian data guna menjawab pertanyaan penelitian dengan merujuk pada kajian literatur yang telah dikaji sebelumnya.

Bab V Simpulan, yang mencakup rangkuman temuan penelitian, keterbatasan penelitian, serta implikasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan bagi instansi atau otoritas terkait dalam perumusan kebijakan.

Sebagai pelengkap, bagian akhir penelitian ini juga menyajikan daftar pustaka dan lampiran penelitian.